

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

China merupakan salah satu aktor hubungan internasional yang kini memiliki peran penting dalam tatanan global. Pada beberapa tahun terakhir, China telah menjadi salah satu negara yang geliat dan pengaruhnya patut diperhitungkan baik dalam skala regional maupun global (Ganewati Wuryandari A. E., 2011, hal. 8). Aspek politik, ekonomi, dan militer merupakan wilayah kerja China untuk menunjukkan ambisinya sebagai kekuatan adidaya global baru. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam bukunya *China's Foreign Relations* (1998) Denny Roy mengemukakan bahwa kemampuan China untuk tampil sebagai aktor superpower global diabad 21 dapat dibuktikan dengan adanya fakta kehadiran China sebagai aktor ekonomi terbesar dunia (*world's largest economy*), aktor berpengaruh dalam politik internasional (*the influential actor in international politics*), serta aktor militer kuat (*strong military actor*) yang tidak terbantahkan.

Militer merupakan bagian yang sangat penting dari strategi nasional China baik dalam lingkup domestik maupun non domestik. Militer menjadi instrument untuk mempertahankan kedaulatan nasional, integrasi teritorialnya, serta mencegah musuh yang dapat mengganggu kepentingan nasional China (Yuliartono, 2009, hal. 2). Oleh karena itu, China tumbuh menjadi negara yang sangat fokus dalam mengembangkan kekuatan militernya. Kapasitas militer China dapat dilihat dari adanya berbagai jenis peralatan militer modern baik di

bidang armada darat, udara, maupun laut (DPR, 2012, hal. 6). Mengukur kekuatan militer China juga dapat tinjau dari alokasi anggaran militer China. Alokasi anggaran pertahanan yang disediakan China tiga kali lebih banyak dari India dan lebih besar dari kombinasi belanja militer Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Vietnam. Berdasarkan laporan dari *International Institute for Strategic Studies* Bulan Februari 2014, diperkirakan belanja militer China pada tahun 2020 akan menyamai Amerika Serikat. China telah menaikkan anggaran militernya selama lima tahun ini yaitu, dinaikkan 12,7 persen pada tahun 2011, 11,2 persen pada tahun 2012, serta 10,7 persen pada tahun 2013. Berdasarkan Laporan berita dari Deutsche Welle (DW) pada tanggal 03 Mei 2014, dengan judul Ambisi Militer China, disampaikan bahwa China memiliki komitmen tinggi untuk melakukan modernisasi militer sebagai manifestasi dari keinginannya untuk menjadi kekuatan militer terbesar dunia.

Kerjasama dalam bidang militer merupakan salah bentuk upaya China dalam mewujudkan komitmen sebagai negara militer kuat global. Selain hal tersebut, kerjasama militer merupakan bentuk kesungguhan China dalam turut berpartisipasi mewujudkan stabilitas keamanan global dan mengamankan kepentingan nasionalnya (Yasuhiro, 2014, hal. 1). Berbagai kerjasama militer dibangun China baik secara bilateral maupun multilateral. Kawasan Asia Pasifik merupakan lingkaran konsentris bagi China dalam membangun jalinan kerjasama tersebut. Pasalnya, Asia Pasifik merupakan kawasan bernilai strategis penting baik dalam segi ekonomi, politik, maupun militer. Hadirnya aktor-aktor berpengaruh global seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia yang

cukup intens dalam mengikuti dinamika kawasan menjadi kekhawatiran sendiri bagi China (Easton, 2013, hal. 8). Kawasan Timur Tengah juga menjadi wilayah kerja baru China dalam menggandeng mitra dalam bidang militer (Dorsey, 2016, hal. 3). Eksistensi militer China juga dapat dilihat geliat dan pengaruhnya di Kawasan Amerika Latin dan di beberapa negara kawasan Afrika seperti Sudan, Zimbabwe, dan Nigeria. (Enuka, 2012, hal. 1). Berdasarkan tulisan Matsuda Yasuhiro dalam sebuah esai berjudul *China;s Military Diplomacy*, setidaknya terdapat tiga objek kerjasama militer yang dilakukan China yaitu, *pertama* melakukan pelatihan dan penguatan unit militer. *Kedua*, penguatan kerjasama dalam bidang senjata dan teknologi militer. *Ketiga*, pengenalan teknologi militer terbaru. Kaitannya dengan isu pangkalan militer, China belum pernah mengusung hal tersebut sebagai bagian dari kerjasama militernya di dunia internasional.

Kebijakan pembangunan pangkalan militer China di kawasan Djibouti pada awal tahun 2016 telah menarik perhatian komunitas internasional baik dari aktor negara, non negara, ataupun media internasional. Pasalnya, kebijakan ini menjadi terobosan baru dari pemerintah China dalam hal pertahanan dan militer dengan melakukan pembangunan pangkalan militer untuk yang pertama kalinya disepanjang sejarah kenegaraannya. Selain hal tersebut, pemilihan lokasi pembangunan juga menjadi isu penting yang menyertainya. Hal ini terjadi karena, Djibouti merupakan negara kecil (*small state*) yang berlokasi di semenanjung Pantai Timur Laut Afrika. Dalam laporan tertulisnya tertanggal 9 April 2016, BBC News menjelaskan bahwasanya

Djibouti merupakan negara tandus dengan perekonomian bergantung pada sektor pelabuhan. Meskipun tergolong sebagai negara miskin, negara yang berlokasi di Selat Bab el-Mnadeb ini merupakan negara yang mempunyai peran penting dalam jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Hal ini selaras dengan keberadannya yang juga menjadi wilayah pintu gerbang untuk menuju Terusan Suez. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Terusan Suez merupakan salah satu rute pelayaran dan perdagangan internasional tersibut di dunia. Alasan kedua yang menjadikan kebijakan pemilihan lokasi pembangunan pangkalan militer menjadi pusat perhatian publik internasional ialah terkait dengan keputusan China untuk membangun pangkalan militer di wilayah negara dimana juga terdapat salah satu bangunan pangkalan militer terbesar dari Amerika Serikat. Selain hal tersebut, karakter militer China yang lebih cenderung bercorak pertahanan di kawasan udara serta berfokus sebagai produsen alat utama sistem pertahanan (Cheng, 2015). Hal tersebut juga turut menyertai adanya indikasi perubahan startegi kekuatan pertahanan yang dibangun China saat ini.

Kebijakan pembangunan pangkalan militer pertama China tersebut telah mengisi kekosongan data perjalanan militer China di tengah tren pentingnya pembangunan pangkalan militer bagi negara maju. Terobosan tersebut menjadi suatu kebijakan yang mengindikasikan adanya faktor-faktor determinan sehingga mendorong China untuk memutuskan melakukan pembangunan pangkalan militer sebagai bagian dari startegi nasionalnya di kancah internasional. Selain hal tersebut, sebagai aktor negara yang memiliki

komitmen untuk memperbesar pengaruh di kancah global, China saat ini sedang dihadapkan pada pendefinisian kepentingan keamanan (*security interest*) di beberapa negara yang masih memiliki tingkat rendah dalam hal stabilitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, ialah: ***“Mengapa China memutuskan untuk membangun pangkalan militer di Djibouti, Afrika pada tahun 2016?”***.

C. Landasan Teoritik

Teori berujud sekumpulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi itu terdapat konsep-konsep, bisa juga diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis (Mas'ood, 1990, hal. 189). Selain itu, dalam ilmu sosial, teori memiliki dua fungsi. Pertama, teori berfungsi secara mudah bagi peneliti untuk mengorganisasikan data. Kedua, teori memungkinkan peneliti mengembangkan prediksi bagi situasi-situasi yang belum ada datanya. Prediksi membawa kepada hipotesis yang menjadikan tindakan penelitian lebih terarah, efisien, dan sistematis (Azwar, 1998, hal. 39-40).

Untuk dapat menjawab rumusan masalah sebagai pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini, yaitu terkait alasan yang mendorong China untuk memutuskan melakukan pembangunan pangkalan militer

pertamanya di Djibouti, Afrika pada tahun 2016, penulis akan mengimplementasikan Teori Kebijakan Politik Luar Negeri dari William D. Coplin sebagai teori tunggal dalam menjawab pokok permasalahan dalam skripsi ini.

Pengertian pada umumnya Politik Luar Negeri merupakan keputusan suatu negara terhadap negara lainnya. Lebih jauh, politik luar negeri merupakan hasil perpaduan dan refleksi dari kondisi dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi internasional (Ganewati Wuryandari A. E., 2011). Menurut **Brown**, politik luar negeri dapat dipahami sebagai cara untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar (Ganewati Wuryandari D. M., 2008). Dalam bentuknya, politik luar negeri dapat berupa kebijakan, hubungan, ataupun *statment*. Terlepas dari segala bentuk politik luar negeri tersebut, suatu proses politik luar negeri merupakan sebuah keniscayaan yang ada dalam politik luar negeri. Proses tersebut dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang kuat, matang, dan strategis dari subjek pembuat politik luar negeri. Begitu halnya dengan bentuk politik luar negeri dengan bentuk produk kebijakan.

Dalam studi kasus ini penulis akan menggunakan Teori Pengambilan keputusan yang digagas oleh William D. Coplin. Menurut Willian D.Coplin dalam Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri atau Foreign Policy setidaknya yang dapat dipahami ialah: “apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar

negeri. Dan salah besar bila menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan. Tetapi sebaliknya, tindakan politik tersebut dipandang sebagai akibat dari pertimbangan yang mempengaruhi para pembuat kebijakan luar negeri” (Coplin & Marbun, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis, 2003, hal. 30).

Dalam penyusunan suatu politik luar negeri, William D. Coplin menjelaskan atas adanya tiga pertimbangan yang dapat mempengaruhi suatu negara untuk menentukan politik luar negeri negaranya. Tiga pertimbangan atau pertimbangan tersebut yaitu,

1. Kondisi politik dalam negeri/ politik domestik

Dalam pandangan coplin, politik dalam negeri suatu negara memiliki peranan penting kaitannya dengan proses penyusunan politik luar negeri negara tersebut. Coplin menjelaskan lebih jauh terkait politik dalam negeri dengan fokus penjelasan pada adanya peran aktor-aktor politik dalam negeri di dalam penyusunan suatu keputusan politik luar negeri suatu negara. Aktor-aktor tersebut dikenal dengan konsep *policy influencers* (aktor yang mempengaruhi kebijakan). Dalam hal ini, *policy influencer* bertindak sebagai faktor pendorong penyusunan suatu politik luar negeri. Aktor tersebut ialah birokrasi, partai, kepentingan dan massa

2. Situasi ekonomi atau militer

Dalam proses penyusunan politik luar negeri, Coplin berasumsi bahwa pertimbangan pada aspek kondisi ekonomi dan militer negara menjadi salah satu faktor pendorong para aktor pembuat kebijakan politik luar negeri merumuskan suatu formulasi politik luar negerinya di dunia internasional. Coplin menjelaskan bahwa tingkat kemampuan ekonomi dan militer negara sangat mempengaruhi bentuk politik luar negeri negaranya di tatanan global.

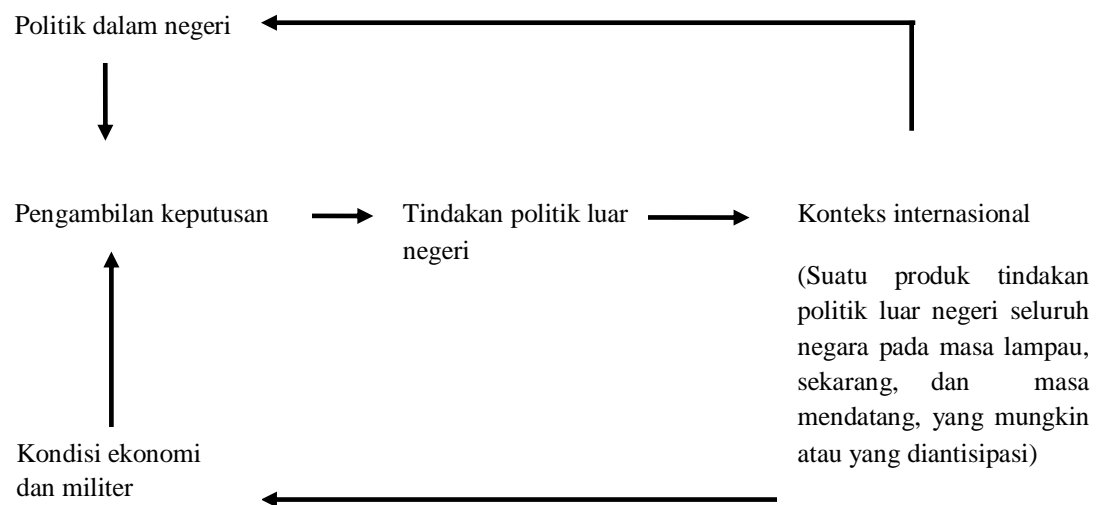
3. Konteks Internasional,

Menurut Coplin dalam teorinya, kondisi internasional atau konteks internasional menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas politik luar negeri suatu negara. Terdapat tiga elemen utama kondisi internasional yang mempengaruhi penyusunan politik luar negeri tersebut yaitu, kondisi geografis, ekonomi dan politik di pusran politik internasional (Coplin & Marbun, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis, 2003, hal. 165-172).

Kebijakan Luar negeri merupakan suatu keputusan yang didahului oleh sebuah mekanisme politik dimana tuntutan dari domestik politik atau politik dalam negeri, kemampuan dari kekuatan ekonomi dan militer negara serta pertimbangan situasi internasional menjadi tiga determinan yang mempengaruhi hasil dari mekanisme politik tersebut. Untuk lebih jelas memahami tentang proses pembuatan kebijakan luar negeri seperti yang di jelaskan oleh William D. Coplin. Dalam bukunya William D

Coplin berikut akan ditampilkan model tentang proses pembuatan Keputusan Luar Negeri sebagai adopsi dari teori yang telah dipaparkan Coplin.

Gambar 1.1. Model Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri William D. Coplin



Sumber : William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis Edisi Kedua (Coplin & Marbun, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis, 2003, hal. 30).

Teori pembuatan kebijakan luar negeri di atas menjelaskan bahwa implementasi kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh adanya konstelasi politik secara internal (politik domestik dan kondisi ekonomi serta militer) dan eksternal (kondisi internasional) yang keadakannya saling memberikan pengaruh antara satu dengan lainnya sehingga mendorong para pembuat keputusan memutuskan suatu formulasi politik luar negeri bagi negaranya.

Dari model pengambilan kebijakan politik luar negeri yang telah didesain oleh William D. Coplin tersebut, penulis akan mencoba

menjelaskan terkait proses pengambilan kebijakan politik luar negeri dari studi kasus yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini yaitu, kebijakan pembangunan pangkalan militer China di Djibouti, Afrika pada tahun 2016.

China merupakan negara dengan karakter politik yang cukup unik. Pasalnya, dalam sistem politik China, dikenal adanya hubungan vertikal power sebagai struktur kekuasaan negara dengan basis ideologi komunis. Ideologi tersebut menjadi ruh dalam setiap aktivitas politik negara tirai bambu tersebut. Tiga vertikal power tersebut ialah keberadaan The Communist Party of China (CPC), The State Council dan The People's Liberation Army (PLA). Terlepas dari adanya *overlapping* atau tumpang tindih dalam aspek fungsi antara CPC dan The State Council karena keduanya memiliki pemimpin yang sama, namun kaitannya dengan penyusunan politik luar negeri China, ketiga aktor tersebut merupakan *official foreign policy actors* di China (Jokobson & Knox, 2010, hal. 4). Oleh karena itu, dalam skripsinya akan diberikan kajian atau penelitian pada peran-peran baik pihak birokrasi, partai, kepentingan ataupun massa di Negara China dalam kaitannya dengan adanya kebijakan pembangunan pangkalan militer China di Djibouti, Afrika pada tahun 2016 merupakan implementasi pertama untuk melihat faktor determinan dari politik dalam negeri China atas kebijakan tersebut.

Fakta adanya peran yang kuat China dalam bidang ekonomi dan militer global menjadi pijakan utama untuk menganalisis terkait

consideran kedua yang disampaikan Coplin dalam teorinya. Consideran tersebut ialah faktor ekonomi dan militer negara. Selama empat tahun terakhir, pertumbuhan China telah menyentuh angka 10 persen (Ganewati Wuryandari A. E., 2011, hal. 8). Dengan angka tersebut, diprediksikan pada tahun 2050, China dapat menggeser posisi Amerika Serikat di dunia internasional. Penggunaan kekuatan militer China sebagai yang masih terfokus pada tiga bidang kerjasama militer yaitu, pelatihan pengutana unit militer, kerjasama peralatan pertahanan dan pengenalan teknologi militer menjadi faktor yang turut akan difokuskan perannya dalam penelitian ini.

Adanya peran Amerika Serikat rival China di dunia internasional yang semakin signifikan di kawasan Afrika menjadi elemen yang akan dijelaskan sebagai consideran konteks internasional dalam proses kebijakan politik luar negeri ini. Kawasan Afrika merupakan mitra penting bagi Amerika Serikat. Pada tahun 2004. Amerika Serikat telah menanamkan investasi sebesar US\$ 13,5 Miliar kepada negara-negara sub- sahara di Afrika dan pada tahun 2005 Amerika Serikat telah menghabiskan dana sebesar US\$ 40,1 Miliar untuk mengimport minyak dari Afrika (Safitri, 2014, hal. 271). Fakta tersebut akan menjadi bagian untuk menjelaskan faktor determinan ketiga sebagai consideran yang mempengaruhi pembuat kebijakan politik luar negeri China terkait pembangunan pangkalan militer pertamanya di Djibouti, Afrika.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teoritik yang telah dipaparkan, maka dapat diperoleh hipotesa atau jawaban sementara dari pokok penelitian ini yaitu: **China memutuskan untuk membangun pangkalan militer di Djibouti, Afrika pada tahun 2016 karena,**

1. Adanya pengaruh konteks internasional berupa hegemoni beberapa kekuatan asing yang kuat di kawasan strategis Djibouti, Afrika baik dalam bidang ekonomi, militer dan politik.
2. Secara politik dalam negeri China, adanya dukungan kuat dari Partai Komunis China (*The Communist Party of China*) dalam mewujudkan *China as Global Maritime Actor*.
3. Adanya pengaruh kuat dari kondisi ekonomi dan militer yang ada di China. Yaitu, dalam aspek kondisi ekonomi, adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong China untuk membuat kebijakan yang selaras dengan upaya China dalam memelihara kemitraan perdagangan dengan kawasan Afrika serta dalam aspek kondisi militer, perlu adanya pengembangan sektor wilayah kerjasama China yang lebih strategis, khususnya dalam hal militer di tengah kuatnya pusran pengaruh militer asing di Kawasan Afrika.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Penulis melengkapi data dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang telah dilakukan dengan cara menghimpun

data sekunder dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dan literatur-literatur yang relevan seperti buku-buku hasil terkait China, dinamika hubungannya dengan Afrika ataupun terkait militer di tatanan global, buku-buku panduan lain, berita (*news*), data elektronik (internet), dan data lainnya yang berhubungan dengan rumusan masalah.

2. Metode Pengolahan Data

Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deduktif yaitu, mengelaborasi teori-teori pada landasan teoritik dengan unit analisisnya yaitu, mengelaborasi teori untuk kemudian diaplikasikan pada studi kasus yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini. Dalam hal ini ialah pengaplikasian Teori Geopolitik serta Teori Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri untuk dijadikan landasan analisa dalam menjawab pokok permasalahan penelitian yaitu, alasan China memutuskan untuk membangun pangkalan militer pertamanya di Djibouti, Afrika pada tahun 2016.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PANGKALAN MILITER CHINA DI DJIBOUTI, AFRIKA TAHUN 2016”** ini ialah:

1. Untuk mengetahui lebih mendalam terkait bentuk pangkalan militer yang akan dijadikan basis kekuatan militer China di kancah internasional.

2. Untuk mengetahui faktor determinan yang mendorong China memutuskan untuk membangun pangkalan militer pertamanya di luar negeri. Dalam hal ini ialah di Djibouti, Afrika.

G. Batasan Penelitian

Untuk menghindari adanya pelebaran penjelasan mengenai alasan yang melatarbelakangi China dalam membuat kebijakan politik luar negerinya berupa keputusan pembangunan pangkalan militer China di Djibouti, Afrika pada tahun 2016 maka dibutuhkan batasan penelitian secara riil. Adapun batasan penelitian ini adalah kebijakan pembangunan pangkalan militer China pada tahun 2016 beserta segenap proses negosiasi dan implikasinya, reformasi kebijakan militer di China, analisa zona objek meliputi Djibouti dan kawasan Afrika secara luas, konteks internasional didasarkan pada fakta-fakta global yang relevan pada studi kasus.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini agar dapat menghasilkan suatu karya tulis ilmiah yang terpadu, maka penulis akan membagi elaborasi dalam beberapa bab dimana setiap bab memiliki korelasi dan saling keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Berikut ialah perumusan bab dalam penelitian kualitatif ini:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teoritik, hipotesa, metode penulisan, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan membahas mengenai lanskap politik, ekonomi, dan militer China secara lebih mendalam. Dalam bab ini, penulis akan mencoba untuk menjelaskan pokok bahasan bab dengan mengelaborasi dalam tiga sub bab yaitu, sub bab pertama membahas mengenai kekuatan politik China. Sedangkan sub bab kedua akan membahas mengenai kekuatan ekonomi China serta sub bab ketiga akan membahas mengenai kekuatan militer China baik dalam perspektif dalam negeri maupun luar negeri.

BAB III akan membahas mengenai kebijakan pembangunan pangkalan militer China di Djibouti, Afrika pada tahun 2016. Penulis akan mencoba memperinci pembahasan dalam bab ini dengan memberikan elaborasi terkait kebijakan militer China, hubungan kerjasama militer China, jenis pangkalan militer yang dibangun China, Selain hal tersebut, penulis akan memberikan sub bab khusus yang bertujuan untuk memberikan usulan mengenai Djibouti sebagai latar tempat yang menjadi tujuan dari kebijakan politik luar negeri China tersebut.

BAB IV akan membahas mengenai substansi yang ada dalam poin-poin hipotesa dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat dua poin utama hipotesa yang merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang diajukan penulis dalam penelitian.

BAB V merupakan kesimpulan atau penutup dari keseluruhan bab yang telah dibahas, berisi ringkasan singkat tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari seluruh hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.